

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

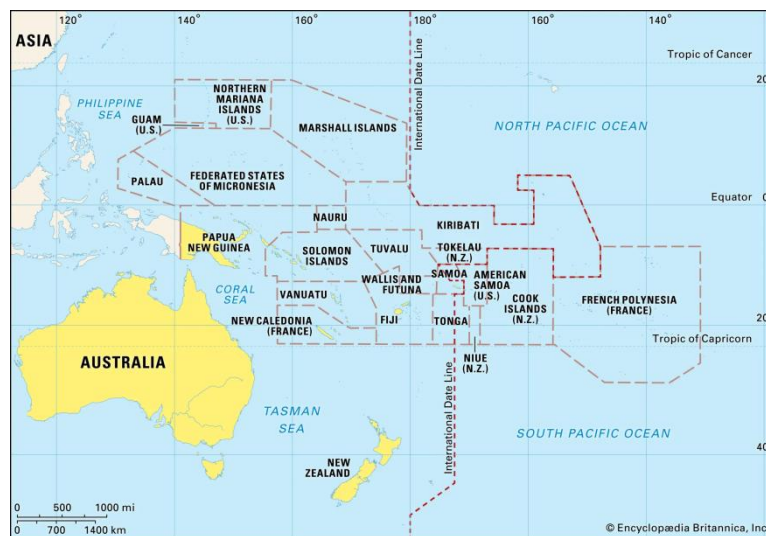
Setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing dalam mencapai kepentingan nasional negara tersebut (Azizah, 2020). Secara khusus, negara bertujuan untuk bertahan hidup dalam sebuah sistem internasional dimana tidak ada otoritas tinggi yang dapat menolong, kondisi ini disebut dengan anarki. Karena ketiadaan otoritas tinggi tidak ada yang dapat menjamin keamanan negara itu sendiri, maka negara bersaing satu sama lain agar memperoleh keamanan untuk bertahan hidup (Mearsheimer, 2001), maka dari itu sistem internasional sangat mempengaruhi perilaku maupun tindakan negara, termasuk dalam merumuskan kebijakan luar negeri (Waltz, 1967). Kebijakan luar negeri menjadi sebuah aksi politik yang berupaya dalam memberikan pengaruh diluar lintas batas negara (Webber & Smith, 2002).

Bagi Australia keamanan adalah hal yang sangat krusial, letak geografis Australia yang ada di antara Pasifik Selatan dan Asia Tenggara mempengaruhi sensitivitas Australia terhadap penurunan stabilitas secara signifikan di kawasan Pasifik Selatan (Herr & Bergin, 2011), hal ini disebabkan oleh rasa keterasingan Australia secara geografis, politik, dan budaya yang menimbulkan persepsi ancaman tingkat tinggi (O'Keefe, 2022). Berakar dari letak geografis, prioritas strategi Australia bergantung pada negara-negara di lingkungan terdekatnya (Dibb, 1986). Persepsi "*arc of instability*" muncul didasarkan pada kerentanan Pasifik Selatan yang dapat menimbulkan risiko bagi Australia, terutama jika

terpengaruh oleh kekuatan oposisi, tidak hanya konflik diantara negara adidaya tetapi juga organisasi kejahatan atau teroris yang memicu kegelisahan Australia pada kestabilan Pasifik Selatan (Commonwealth of Australia, 2000).

Pada garis khatulistiwa yang memisahkan antara selatan dan utara, kawasan Pasifik Selatan secara geografis mengacu negara yang berada di selatan Samudera Pasifik (G. Fry, 1997), membentang dari Australia dan Papua Nugini di barat hingga ke timur sampai Amerika Selatan (Thakur, 1991). Ada beberapa negara yang tepat berada di kawasan Pasifik Selatan yaitu Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Tuvalu, Kaledonia Baru, Fiji, Kiribati, Walis dan Futuna, Tokelu, Samoa, Tonga, Nieu, Samoa Amerika, Kepulauan Cook, Polinesia Prancis, Kepulauan Pitcairn, dan Pulau Paskah.

Gambar 1.1. Peta Pasifik Selatan



Sumber: Encyclopaedia Britannica

Pulau-pulau kecil yang tersebar di Pasifik Selatan sebagian merupakan teritori milik negara metropolitan, hingga saat ini wilayah tersebut masih menjadi teritori dari Prancis (Kaledonia Baru, Walis dan Futuna, dan Polinesia Prancis), Inggris (Kepulauan Pitcairn), Amerika Serikat (Samoa Amerika), Selandia Baru (Tokelu),

maupun Chili (Pulau Paskah). Wilayah-wilayah ini tidak memiliki kedaulatan, yang berarti secara konstitusional tergabung dengan negara-negara metropolitan (Firth, 1989). Ragamnya status politik di Pasifik Selatan selain dari wilayah teritori, terdapat negara-negara yang memperoleh kemerdekaan dan juga tergabung dalam negara asosiasi dengan Selandia Baru (Firth, 2018). Semenjak kemerdekaan Pasifik Selatan berusaha untuk menyediakan layanan dasar bagi penduduknya, Canberra sebagai negara maju di kawasan menyediakan bantuan dan dana untuk organisasi regional yaitu *Pacific Island Forum* (PIF) dalam menjaga stabilitas keamanan negara-negara di Pasifik Selatan bersama dengan Selandia Baru (Hawksley, 2009).

Selain memiliki keberagaman dalam status politik, Pasifik Selatan juga memiliki potensi ketidakstabilan. Sebagian besar negara-negara di Pasifik Selatan telah mengadopsi sistem politik berdasarkan pada perpaduan tradisi lokal dan pemerintahan parlementer bergaya Inggris, di awal kemerdekaan dan kemandirian negara di Pasifik Selatan telah menghadapi masalah yang cukup kompleks dengan sifat personalistik para pemimpinnya yang disebabkan perbedaan etnis dan juga daerah karena nilai-nilai tradisi lokal yang melekat, dengan demikian meningkatkan ketidakstabilan politik domestik negara-negara Pasifik Selatan (Fairbairn et al., 1991). Pergolakan politik Pasifik Selatan diwarnai dengan pemberontakan dan kudeta, seperti pemberontakan di Papua Nugini tahun 1989, percobaan kudeta di Vanuatu pada tahun 1988, dan pembunuhan dua tokoh besar suku kanak di New Caledonian di tahun 1989 (Hamid, 1992), efek domino ini juga dirasakan Fiji pada kudeta militer pada tahun 1987 dan 2006 (Hameiri, 2015), hingga konflik etnis yang terjadi di Kepulauan Solomon pada tahun 1998

sampai dengan 2003 (Prakasa et al., 2018). Untuk menghindari kegagalan pada negara-negara di Pasifik Selatan dan menjaga stabilitas keamanan kawasan, Australia melakukan serangkaian intervensi seperti pada Kepulauan Solomon di tahun 2003 dengan membentuk *Regional Assistance Mission to Solomon Island* (RAMSI) bersama dengan 15 anggota *Pacific Island Forum* (PIF) (Prakasa et al., 2018), dan juga beberapa negara lainnya.

Organisasi regional yaitu *Pacific Island Forum* (PIF) merupakan organisasi regional utama yang menjadi medium bagi negara-negara Pasifik dalam isu-isu utama mengenai perlindungan sumber daya alam, isu lingkungan hidup, akses tuna, penangkapan ikan, isu pengujian nuklir dan dekolonisasi, sebagai bentuk dari diplomasi Pasifik agar dapat bernegosiasi dengan kekuatan eksternal dalam forum global (G. E. Fry, 2015). Australia merupakan negara termaju di kawasan Pasifik Selatan dengan julukan *global middle power* terlihat pada peran Australia dalam *Pacific Island Forum* (PIF) sebagai sumber pendanaan utama bersama dengan Selandia Baru, dan sebagian dari sepertiga anggaran operasional di sediakan negara-negara Pasifik secara kolektif (Shibuya, 2004). Komitmen Australia sebagai pemberi donor terbesar di kawasan telah memberi lebih dari AU\$1.1 miliar dana bantuan ditahun 2014-2015 (Hayward-Jones, 2015), selaku bagian dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) bantuan yang berasal dari Australia diberikan dalam bentuk ODA (Official Development Assistance) (OECD, n.d.).

Peranan PIF sangat lemah dalam merepons perubahan iklim, forum ini terhambat oleh terbatasnya kapasitas, dan kepentingan nasional yang mengesampingkan manfaat regional (Shibuya, 2004). PIF memiliki prinsip *non-*

interference untuk menghormati kedaulatan para anggotanya, meskipun begitu Australia melakukan berbagai intervensi di beberapa negara Pasifik Selatan, hal ini menimbulkan citra kurang baik bagi Australia terutama dengan status sebelumnya sebagai negara kolonial di kawasan ini. Citra Australia menurun setelah pernyataan bahwa Australia tidak menyetujui penargetan yang mengikat pengurangan gas emisi rumah kaca karena di khawatirkan akan berdampak pada perekonomian Australia yang mana bertolak belakang dengan komitmennya untuk mengurangi gas emisi rumah kaca (Shibuya, 2004).

Dari beberapa negara kawasan Pasifik Selatan yang merdeka, hanya terdapat empat negara saja yang memiliki kapasitas pertahanan yaitu Papua Nugini, Fiji dan Tonga yang memiliki lembaga militer formal, sedangkan Vanuatu hanya memiliki unit paramiliter yang memiliki fungsi sama untuk menjaga keamanan (Herr & Bergin, 2011). Kawasan Pasifik Selatan merupakan salah satu kawasan yang paling rawan bencana alam, berlangsungnya perubahan iklim saat ini ditakutkan akan berdampak pada peningkatan frekuensi terjadinya bencana alam di kawasan, lemahnya kapasitas negara untuk mengelola menarik banyak aktor eksternal bahkan aktor non-negara termasuk organisasi kriminal dan kelompok lingkungan hidup yang memiliki potensi pengaruh besar di kawasan ini, seperti kelompok Sea Shepherd sebuah LSM yang merupakan organisasi aktivis lingkungan telah mengajukan kerjasama pada Palau untuk membantu memantau di sekitar teritori Palau terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal (Herr & Bergin, 2011). Kerentanan pada keamanan negara-negara Pasifik Selatan menjadi perhatian Australia dengan ketergantungan pada bantuan eksternal, hal ini membuka potensi terhadap tekanan yang dapat dialami oleh negara di kawasan

Pasifik Selatan akibat negara lain seperti kepentingan China yang berdimensi militer akan memberikan dampak ketidakstabilan kawasan.

Ketika kudeta kedua Fiji ditahun 2006 Australia tidak mengintervensi Fiji, akan tetapi memberikan sanksi ekonomi untuk mengisolasi Fiji dari forum PIF. Sebagian besar perdagangan dan investasi Fiji terdampak karena perekonomian Fiji bergantung pada Australia, hal ini dilakukan Canberra untuk memberi tekanan pada Fiji agar merubah sistem pemerintahannya menjadi demokrasi (Hameiri, 2015). Sanksi Australia pada Fiji memicu China untuk mengisi kekosongan peran Australia, yakni dengan meningkatkan keterlibatan China melalui pembentukan sebuah forum ekonomi bernama *China-Pacific Island Countries Economic Development and Cooperation Forum* pada tahun 2006 di Fiji, yang dihadiri oleh Perdana Menteri China Wen Jiabao disertai pemberian pinjaman lunak sebesar US\$500 juta dalam bentuk hadiah (Hawksley, 2009). Sebagai negara yang berstatus mikro, negara-negara Pasifik Selatan sangat bergantung pada bantuan luar negeri, bagi negara seperti China ini mendatangkan kesempatan (Biddick, 1989). Peningkatan kehadiran China di kawasan Pasifik ditunjukkan pada kegiatan bantuan yang di berikan ke Pasifik Selatan. Menurut penelitian, Beijing menjadi penyedia bantuan terbesar ketiga di Pasifik Selatan setelah Australia dan Amerika Serikat ditahun 2009 (Fifita & Hanson, 2011).

Kehadiran China ini didasari oleh kebijakan *One China Policy* untuk mendapatkan pengakuan diplomatik bahwa ada satu China yang berdaulat (Nabhila, 2017), dengan tujuan mengisolasi Taiwan agar tidak mendapat pengakuan sebagai negara, implementasi kebijakan satu China dilakukan untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan bantuan dari Beijing (Hanson, 2008a).

Sanksi Australia terhadap Fiji dimanfaatkan Beijing untuk melakukan *chequebook diplomacy* di kawasan Pasifik Selatan yang mana ada beberapa negara Pasifik Selatan yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan yaitu Nauru, Kiribati, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu dan Kepulauan Solomon (Seib, 2009). Berbagai hibah dan bantuan yang diberikan China bersifat bilateral seperti pada proyek pembangunan kompleks parlemen di Vanuatu, gedung pemerintah di Samoa, kementerian luar negeri baru di Papua Nugini, hingga pusat konferensi, gedung sekolah, dan stadion olahraga di Fiji, Palau, Papua Nugini, Samoa, Tonga dan Kepulauan Cook, pada pengembangan kerjasama dengan negara-negara di Pasifik Selatan berfokus dalam tiga bidang yaitu proyek konstruksi, pengampunan hutang, dan bantuan kemanusiaan (Seib, 2009). China telah memiliki hubungan diplomatik dengan kesepuluh negara Pasifik Selatan yang terdiri dari Fiji, Samoa, Papua Nugini, Vanuatu, Micronesia, Kepulauan Cook, Tonga, Niue, Kepulauan Solomon dan Kiribati (Szadziwski, 2021)

Pada pertemuan *China-Pacific Island Countries Economic Development and Cooperation Forum* ditahun 2013 yang dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat China, Wang Yang, menyampaikan bahwa China akan menyediakan pinjaman lunak sebesar US\$1 miliar melalui *China National Development Bank* untuk mendukung pembangunan infrastruktur negara-negara di Pasifik Selatan, tidak hanya itu China juga akan meningkatkan kegiatan ekspor negara di Pasifik Selatan, menyediakan beasiswa, berbagai fasilitas medis, meningkatkan turisme, dan memberikan dukungan dalam perlindungan lingkungan (Government of People's Republic of China, 2013). Pesatnya pengaruh ekonomi Beijing menciptakan ketergantungan pada negara di kawasan

Pasifik Selatan, seperti yang dikemukakan dalam teori neoliberal institusionalisme bahwa institusi politik dunia memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perilaku pemerintah (Keohane, 2020).

Pada tahun 2016 menjadi puncak tertinggi pengeluaran bantuan Beijing pada Pasifik Selatan yang bernilai US\$287.30 juta (Li, 2022), terakumulasi dari tahun 2000 hingga 2016 bahwa China telah memberikan bantuan kepada negara di Pasifik Selatan sebesar US\$1.8 miliar (Brant, 2016). Bantuan China disambut dengan tangan terbuka oleh negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang sangat bergantung pada bantuan yang diberikan. Seiring dengan berkembangnya perekonomian China, dibentuk seperangkat inisiatif yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI) yang telah menarik negara-negara di Pasifik Selatan, tahun 2015 dalam *Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road*, China menyebutkan bahwa wilayah Pasifik Selatan termasuk kedalam jaringan perdagangan BRI dengan penambahan jalur *Maritime Silk Road* di kaki selatan (Young, 2016), ditegaskan bahwa hubungan antar masyarakat menjadi aspek terpenting dalam hubungan bilateral melalui BRI (Szadziewski, 2021).

Pada tahun 2018 kedelapan negara Pasifik Selatan telah menandatangani nota kesepahaman pada kerjasama bilateral yang tergabung dalam *Belt and Road Initiative* (BRI) (Li, 2022), pola-pola dapat diartikan sebagai upaya “*debt-trap*” diplomasi China pada jaringan perdagangan BRI, ketidakmampuan dalam mengembalikan utang akan dimanfaatkan Beijing untuk melangsungkan pengaruh politiknya dan kepentingan geostrategi pada negara tersebut (Parker & Chefitz, 2018). Mulai pada tahun 2018 aktivitas China mulai meningkat, dengan membuka

dialog bersama Vanuatu untuk perencanaan pembangunan pelabuhan di Espiritu Santo. Pemerintah Australia merespon bahwa pembangunan pelabuhan tersebut diduga akan digunakan sebagai pangkalan militer, dugaan ini dikuatkan dengan lokasi konstruksi pelabuhan berdekatan dengan bandara internasional yang juga ditunjang oleh bantuan China (Haq, 2021), selain itu China juga bersedia mendukung Fiji untuk membangun kembali *Blackrock Camp* yang merupakan pusat pelatihan bagi *Republic of Fiji Military Forces*, kepentingan militer ini tidak hanya ditujukan pada Fiji tetapi Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Samoa, dan Polinesia Prancis. Tindakan asertif China ini juga berimplikasi kepada negara Pasifik Selatan lainnya akibat dari *chequebook diplomacy* di kawasan Pasifik Selatan mempengaruhi Kepulauan Solomon dan Kiribati untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan ditahun 2019, hingga pada tahun 2022 Kepulauan Solomon menandatangani perjanjian keamanan dengan China.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan Pasifik Selatan dapat terjerat oleh *debt-trap* diplomasi, hal serupa terjadi di Sri Lanka saat kepemilikan pelabuhan Hambantota yang menjadi milik China (O'Keefe, 2022). Penetrasi China melalui bantuan maupun kerjasama ekonomi menjerat Tonga, Samoa dan Vanuatu yang berujung memiliki hutang tertinggi di kawasan (Claryssa, 2023), contohnya negara Tonga ditahun 2007 memiliki PDB sebesar US\$299 juta, disaat yang sama Tonga menerima pinjaman China sebesar US\$56 juta yang merupakan 22% dari jumlah PDB-nya, pengeluaran utang tidak sesuai dengan kondisi lokal di Tonga dapat berpotensi pembangunan pangkalan militer dengan kurang transparansi pada bantuan pembangunan China (Seib, 2009).

Keterlibatan angkatan laut *People's Liberation Army* (PLA) di kawasan Pasifik Selatan dalam salah satu programnya yaitu *Peace Ark* merupakan kapal rumah sakit yang berbasis di laut yang menyediakan fasilitas medis dengan tenaga medis profesional (Zhuo, 2023), pada tahun 2014 melalui program *Peace Ark* angkatan laut PLA mengunjungi Fiji, Papua Nugini, Tonga, dan Vanuatu (Zhang, 2021). Terlibatnya program-program bantuan militer, dan kunjungan semi-militer berhubungan dengan zona ekonomi eksklusif di negara-negara kawasan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan akses pelabuhan dalam rangka mengamankan jalur komunikasi laut (SLOC) China (Wallis, 2012). Melihat kepentingan geopolitik China di kawasan ini, mendorong peran China untuk membangun konektivitas dengan mempromosikan BRI yang memungkinkan untuk pembangunan pelabuhan di kawasan. Tindakan asertif China menantang hegemoni Australia di kawasan Pasifik Selatan.

Pasifik Selatan merupakan “*western lake*” atau negara yang berada dalam pengaruh barat, maka tidak hanya Australia yang merupakan partner tradisional di Pasifik Selatan, tetapi Amerika Serikat (AS) juga memiliki hubungan dengan negara-negara di Pasifik Selatan yang merupakan bagian dari *Compact of Free Association* (COFA) seperti Kepulauan Marshall, Mikronesia dan Palau, dan juga wilayah dependensi AS seperti Guam dan Kepulauan Mariana (Siekiera, 2020) yang berada di Pasifik bagian utara. Dominasi Australia, Selandia Baru dan AS di kawasan ini berpusat pada keamanan dan stabilitas rezim di kawasan Pasifik Selatan. Menjamin keamanan kawasan Pasifik Selatan selama Perang Dingin, AS bersama Australia dan Selandia Baru melalui strategi kebijakannya yang menangkal atau *strategic denial* untuk mencegah upaya hegemoni Uni Soviet di

kawasan ini (Seib, 2009). Dalam mempertahankan keamanan dan kestabilan kawasan Pasifik Selatan, Australia bersama dengan Selandia Baru dan Amerika Serikat (AS) membentuk pakta ANZUS (1951) yang bertujuan mengkoordinasikan pertahanan bersama dalam mencegah agresi negara lain di kawasan Pasifik Selatan (Crowley, 1973), berbagai upaya dalam membendung setiap ancaman hegemoni negara lain menjadi ciri khas *strategic denial* negara-negara barat untuk menjaga keamanan kawasan.

Menyangkut keamanan negara-negara Pasifik menjadi prioritas AS dalam menjaga kawasan dari agresi negara lain, dapat dilihat respon AS terhadap keterlibatan stasiun pelacak satelit China di Kiribati yang diduga China berusaha memata-matai program pertahanan rudal AS di Kepulauan Marshall. Kekhawatiran AS terhadap tujuan China menyebabkan Beijing harus menutup stasiun pada tahun 2003 setelah Kiribati mengalihkan kembali pengakuan diplomatiknya ke Taiwan (Yu & Sui, 2021). Kepentingan keamanan Australia tersentralisasi dari kerjasamanya dengan AS dalam menjamin pertahanan Canberra (Gyngell, 2006). Pada saat berakhirnya Perang Dingin Amerika Serikat (AS) mulai mengurangi perhatiannya di kawasan Pasifik Selatan dan secara eksklusif perhatian AS hanya ditujukan pada negara-negara yang tergabung dalam COFA dan wilayah dependensi AS saja (P. Dupont, 2021). Sejak 2010 AS secara signifikan telah menutup kantor kedutaan besar di Samoa dan Kepulauan Solomon, juga kantor-kantor donornya yang terletak di Fiji dan Papua Nugini maupun mengurangi beasiswa dan berbagai bantuan finansial untuk negara-negara di kawasan Pasifik Selatan (Jha, 2019).

Visi pemerintahan Presiden Trump mengadopsi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang merupakan strategi terhadap tantangan persaingan geopolitik saat ini (Government of United States of America, 2019), dijelaskan dalam sebuah dokumen *Indo-Pacific Strategy Report* (IPSR) cakupan strategis Indo-Pasifik secara keseluruhan yang sangat berpusat pada Asia Timur dan ancaman China terhadap tatanan internasional, karenanya kebijakan ini lalai dalam memberikan perhatian strategis pada kepentingan negara-negara di Pasifik Selatan (P. Dupont, 2021). Minim akan perhatian AS di kawasan Pasifik Selatan, menjadikan China mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS, selain itu meningkatnya peran China dalam *Melanesia Spearhead Group* (MSG) dan membentuk *Pacific Island Development Forum* (PIDF) sebagai alternatif medium untuk diplomasi Pasifik yang dapat menggantikan PIF. Pengembangan diplomatik yang baru akan menjalankan aspek penting dalam urusan regional dan mewakili kawasan pada isu utama yang menjadi perhatian saat ini yaitu perubahan iklim dan pengelolaan perikanan (G. E. Fry, 2015), dengan dibentuknya forum-forum ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dalam PIF.

Dukungan China pada kepentingan Fiji terlihat dalam keikutsertaan menjadi pendonor dalam PIDF bersama dengan Kuwait, Uni Emirat Arab dan sejumlah bisnis lokal dengan total donor US\$689 ribu (Tarte, 2015), dan juga kontribusi China sebagai donor maupun pengamat dalam MSG (Cain, 2015), akan tetapi kedua organisasi baru ini mengecualikan Australia dan Selandia Baru sebagai bagian dari Pasifik Selatan. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi Australia akan komitmen AS sebagai partner strategik keamanan Australia.

Kerentanan pada negara-negara Pasifik Selatan menarik penetrasi China yang mempengaruhi kestabilan politik di kawasan, tentunya sebagai hegemoni di kawasan hal ini menjadi tantangan bagi Australia dalam menjaga stabilitas kawasan demi keamanan nasional Canberra. Selain penetrasi ekonomi China pada negara-negara Pasifik Selatan, Australia juga menjalin kerjasama ekonomi sejak tahun 2015 dengan China yang telah memiliki Perjanjian Perdagangan Bebas yang bernilai US\$175 miliar di tahun 2020 (Commonwealth of Australia, 2022b). Dalam mengoptimalkan *middle power diplomacy* untuk menjaga kerjasamanya dengan China dengan mengadopsi *strategic ambiguity* pada setiap kebijakannya (Abbondanza, 2022), karena perkembangan ekonomi China yang pesat memiliki kecenderungan sikap revisionis dengan meningkatnya jejak China yang dianggap dapat menantang *status-quo* Australia di kawasan Pasifik Selatan. Jika negara-negara yang berusaha mendapatkan lebih banyak *power* daripada yang mereka miliki mempunyai kecenderungan revisionis, yang mana akan memungkinkan bagi mereka untuk berusaha mengubah hubungan kekuasaan yang ada untuk mencapai status yang lebih tinggi (Morgenthau, 1985).

Tertuang dalam *Australia 2013 National Security Strategy* bahwa kepentingan utama Australia yaitu menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Pasifik Selatan (Commonwealth of Australia, 2013b), maupun dalam *Australia Defense White Paper 2013* (Commonwealth of Australia, 2013a) dan 2016 (Commonwealth of Australia, 2016b) bahwa keamanan kawasan Pasifik Selatan akan selalu menjadi prioritas utama Australia. Pentingnya menjaga stabilitas regional dan *status quo* Australia dalam menghadapi kebangkitan China sebagai *rising power* di abad ke 21 dengan relatif kapabilitas yang terus meningkat baik ekonomi maupun militer,

ancaman China di kawasan Pasifik Selatan menantang hegemoni Australia. Dilema Australia terhadap pertimbangan kebijakan Amerika Serikat di kawasan Pasifik Selatan yang merupakan partner keamanan dan China yang merupakan partner ekonomi terbesar Australia saat ini, Australia merilis 2017 *Foreign Policy White Paper* yang mana tertulis bahwa stabilitas politik Indo-Pasifik dipengaruhi oleh dua mitra terpenting Australia yaitu, Amerika Serikat dan China, dengan melihat China saat ini sebagai ancaman (Commonwealth of Australia, 2017).

Melindungi keamanan nasional dari berbagai ancaman menjadi kepentingan utama Australia, terdapat kontinuitas pada kepentingan Canberra di kawasan Pasifik Selatan yaitu untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan, meski dihadapkan pada situasi yang dilematis Australia mengupayakan *self-help* untuk mempertahankan *status quo* Canberra dari ancaman China yang telah bertindak asertif di Pasifik Selatan. Dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri 2017 Australia memperkenalkan kebijakan *Stepping-up Our Engagement in the Pacific* atau *Pacific Step-up* yang merupakan prioritas kebijakan tertinggi Australia dalam meningkatkan hubungannya dengan kawasan, secara implisit kebijakan *Pacific Step-up* adalah bentuk respon Australia terhadap ancaman hegemoni China di kawasan Pasifik Selatan. Ada 3 poin utama dalam kebijakan *step-up* yaitu mempromosikan kerjasama ekonomi di Pasifik bersama Australia dan Selandia Baru, menangani isu keamanan, dan memperkuat hubungan antar masyarakat (Commonwealth of Australia, 2017).

Australia telah berkomitmen untuk memberikan bantuan pembangunan senilai AU\$1.4 miliar kepada Pasifik di tahun 2019-2020, di ikuti dengan beberapa inisiatif dari kebijakan *Pacific Step-up* yaitu *Pacific Labour Mobility Scheme*,

program *Coral Sea cable* di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, investasi pada energi terbarukan, pembangunan *Australia Pacific Security College* dan *Pacific Fusion Centre* (Department of Foreign Affairs and Trade, 2019), dibawah naungan institusi ini pasukan militer Australia atau *Australia Defense Force* (ADF) akan mendirikan *Pacific Mobile Training Team* dan akan memperluas kunjungan dan pelatihan regionalnya, juga pembangunan pos-pos diplomatik di Palau, Kepulauan Marshall, Polinesia Prancis, Niue dan Kepulauan Cook (Commonwealth of Australia, 2018c). Kepentingan Australia di kawasan Pasifik Selatan menjadi prioritas penting Australia, mengutip dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia “*To pursue common interest and respond to the region’s fundamental challenges, Australia will engage with the Pacific with the greater intensity and ambition...*” komitmen yang dilakukan Australia agar kawasan Pasifik Selatan dapat lebih terintegrasi baik secara ekonomi maupun keamanan (Commonwealth of Australia, 2017).

Status Australia sebagai negara *global middle power* menjadi kabur dengan kepentingan regional Canberra yang mulai meningkat akibat kebangkitan China, tendensi sebagai *regional power* mulai disorot oleh pemerintah Australia dalam menghadapi tantangan di kawasan yang mana secara geografis kawasan Pasifik Selatan sangat dekat dengan Australia (Carr, 2019). Negara-negara Pasifik Selatan yang rentan memiliki potensi menjadi sumber ancaman, kemungkinan pada pembangunan pangkalan militer China di kawasan memicu naluri *strategic denial* pada kebijakan *Pacific Step-up* untuk membatasi akses-akses negara-negara yang mengancam hegemoni Australia (Lilford, 2019). Maka untuk memperkuat posisi Australia di kawasan melalui kebijakan *Pacific Step-up* ditujukan untuk

mempertahankan posisi Australia sebagai mitra pilihan untuk kerjasama ekonomi dan keamanan di kawasan Pasifik Selatan.

Berdasarkan uraian diatas dalam rangka mempertahankan *status-quo* Australia di kawasan Pasifik Selatan dari ancaman China melihat bagaimana sistem internasional mempengaruhi Australia di kawasan dalam menentukan strategi-strategi, dengan menganalisis strategi kebijakan luar negeri Australia melalui kebijakan *Stepping-up Our Engagement in the Pacific* atau *Pacific Step-up* untuk mengcounter pengaruh China, riset ini akan menjelaskan bagaimana kebijakann *Pacific Step-up* dapat mereduksi hegemoni China di kawasan Pasifik Selatan. Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“KEBIJAKAN STEPPING-UP ENGAGEMENT AUSTRALIA DALAM MENGHADAPAI ANCAMAN CHINA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN”**.

1.2. Perumusan Masalah

Kawasan Pasifik Selatan sangat penting bagi kestabilan keamanan Australia, kehadiran China yang menimbulkan ancaman di kawasan. Tidak dapat dihiraukan perkembangan ekonomi China yang pesat menjadikan Beijing sebagai *rising power* di abad ke 21. Meski kesenjangan kapabilitas antara Australia dengan China, dan Beijing yang merupakan partner ekonomi terbesar Australia, keputusan Australia untuk tetap mempertahankan hegemoninya di kawasan Pasifik Selatan.

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana kebijakan *stepping-up engagement* Australia dalam mereduksi hegemoni China di kawasan Pasifik Selatan?”

1.3. Pembatasan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah yang diuraikan oleh penulis, maka diperlukan pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada hal yang relevan dan penting untuk permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasi hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek pada penelitian. Kawasan Pasifik Selatan terbentang sepanjang 17.000 km secara membujur dari Australia dan Papua Nugini di barat hingga Amerika Selatan di timur (Thakur, 1991), negara-negara di kawasan Pasifik Selatan memiliki status politik yang berbeda-beda yang mana terdapat negara, negara yang tergabung dalam asosiasi, dan wilayah teritori.

Negara Pasifik Selatan memiliki perekonomian yang lemah dibandingkan dengan kedua negara metropolitan seperti Australia dan Selandia Baru, sebagian besar negara-negara di kawasan masih menggantungkan ekonominya pada negara-negara besar. Berbeda dengan wilayah teritori yang secara ekonomi hingga kedaulatannya di atur oleh negara-negara yang memegang kontrol seperti Prancis, AS, Selandia Baru, dan Inggris. Maka penelitian ini akan berfokus Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Tuvalu, Fiji, Kiribati, Samoa, Tonga, Nieu, dan Kepulauan Cook, yang merupakan negara yang berada tepat di Pasifik Selatan dan bukan bagian dari teritori negara-negara metropolitan.

Cakupan dalam penelitian ini adalah mengkaji kebijakan luar negeri Australia, khususnya pada kebijakan kawasan Pasifik Selatan yaitu *stepping-up engagement* yang dirilis pada tahun 2017, sebagai strategi Canberra dalam mereduksi pengaruh China dalam sudut pandang Australia. Intensitas kehadiran

China meningkat dimulai tahun 1980-an di beberapa negara-negara Pasifik Selatan, hingga pada tahun 2022 perkembangan kerjasama maupun kebijakan luar negeri antara Australia dan China terhadap kawasan Pasifik Selatan, yang mana rentan waktu tersebut akan diulas untuk kebutuhan studi kasus yang relevan untuk penelitian.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Riset ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Australia dalam mempertahankan hegemoninya di kawasan Pasifi Selatan.
2. Untuk memahami dinamika politik internasional yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia di kawasan Pasifik Selatan terhadap ancaman China dalam perspektif Australia.
3. Untuk menganalisis kebijakan *stepping-up engagement* Australia dalam mereduksi pengaruh China di kawasan Pasifik Selatan.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya pada kajian kebijakan luar negeri

2. Untuk mencoba menafsirkan implementasi menggunakan konsep kebijakan luar negeridan perspektif neorealismeuntuk memahami fenomena penelitian.
3. Menambah literatur kajian Ilmu Hubungan internasional dalam studi Pasifik Selatan.
4. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.